

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmasasmita, R. (1984). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- Bonger, W. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Desasfuryanto, A. A. (2014). *Criminology (Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana yang Terjadi di Seluruh Indonesia)*. Jakarta: PTIK.
- Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dillah, H. P. (2015). *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Faisal, N. S. (2017). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ishaq, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Lamintang, P. A. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pettanasse, S. (2011). *Mengenal Kriminologi*. Palembang: UNSRI.
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prastowo, A. (2010). *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Raghib, H. R. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sahetapy, J. (1979). *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Santoso, T. (2022). *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono Soekanto, D. (1986). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerodibroto, S. (2007). *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1976). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Sudaryono, & S. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sughandi, R. (1981). *KUHP dan Penjelasan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki, & T. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Syarifuddin Pettanasse. (2011). *Mengenal Kriminologi*. Palembang: UNSRI.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, B. (2022). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Artikel Dalam Jurnal

- Darmawan, A. D. (2024, August 8). Mayoritas penduduk Kabupaten Buleleng pada 2024 adalah usia produktif. *DataBoks*. <https://databoks.katadata.co.id>.
- Fajri, M. (2025). The effectiveness of patrols in routine activities was enhanced by the South Sumatra Regional Police in preventing crimes in Palembang. *International Journal of Social Science Research and Review*, 28, 1–10.
- Gerhana, R. W. (2023). Tinjauan kriminologis tindak pidana pengeroyokan di jalan dan upaya penanggulangannya. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10, 10–20.

- Harahap, M. A. (2022). Kesadaran hukum dan pelanggaran hukum di masyarakat: Tinjauan dalam perspektif penegakan hukum nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 67–78.
- Hartono, M. S. (2022). Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat. *Jurnal Hukum Malahayati*, 6(1), 34–45.
- Hartono, M. S. (2019). Kajian kriminologi terhadap tindak pidana perikanan di Kecamatan Nusa Penida. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 68–79.
- Hartono, M. S. (2020). Penggunaan bukti elektronik dalam peradilan pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 281–302.
- Hartono, M. S. (2021a). Korupsi kebijakan oleh pejabat publik (Suatu analisis perspektif kriminologi). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 1(1), 11–21.
- Hartono, M. S. (2021b). Analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum*, 17(2), 1758–1764.
- Hartono, M. S. (2023). Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 511–524.
- Hartono, M. S., & Yehezkiel. (2024). Penggunaan hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(1), 1–14.
- Ichwanto, A. M. (2017). Tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 34, 1–15.
- Indarti, E. (2019). Community policing sebagai democratic policing: Konteks di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 149–150.
- Kuba, S. (2024). Efektivitas penegakan hukum oleh Polri terhadap kejahatan konvensional di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 10, 1–15.
- Mangku, D. G. S. (2011). Peluang dan tantangan ASEAN dalam penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear di perbatasan Kamboja dan Thailand. *Pandecta*, 6(2), 107–118.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel warning in international law perspective, 6(4), 33–42.
- Mamu, K. Z. (2023). Analisis yuridis tindak pidana pengeroyokan ditinjau dari KUHP. *Yurijaya*, 1–15.
- N, K. D. (2025). Fenomena hazing sebagai pemicu tawuran pelajar STM di Jakarta berdasarkan perspektif teori sub-culture of violence. *Journal of Social Science Research*, 4605, 1–12.

Putri, A. A. (2025). Peran psikologi sosial dalam pembentukan perilaku kriminal: Literature review. *Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling*, 14, 1–12.

Ramadhan, F. (2021). Dinamika kejahatan dan upaya penanggulangannya di Indonesia: Sebuah tinjauan umum. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 98–110.

Shara, D. W. (2019). Peranan visum et repertum dalam proses pembuktian perkara pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/PN. Mdn). *Jurnal Mercatoria*, 2, 1–15.

Siauta, P. R. (2024). Tinjauan kriminologi terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh remaja dalam komunitas geng motor ditinjau dari control social theory (Studi kasus di Kabupaten Karawang). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 1905, 1–15.

Taufik, M. B. (2024). Peran Polri dalam mendorong pembangunan sosial dan keamanan masyarakat secara holistik. *Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam*, 5, 1–10.

Karya Tulis Ilmiah

Fadillah, S. (2021). *Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polsek Semarang Tengah)* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Hanipah, N. N. (2024). *Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak* (Tesis). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Artikel Dalam Internet

Buleleng, P. (2022, Agustus 05). Kondisi Topografi Kabupaten Buleleng. Badan Riset dan Inovasi Daerah. Diambil dari: <https://brida.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/32-kondisi-topografi-kabupaten-buleleng>.

Edwin. (2024, September 18). Pengertian Kriminologi dalam Hukum. Info Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diambil dari: <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kriminologi-dalam-hukum/>.

Ermalia, A. A. (2021, Juni). Penjelasan Ahli Hukum Pidana Soal Pengeroyokan di Bali. IDN Times Bali. Diambil dari: <https://bali.idntimes.com/news/bali/penjelasan-ahli-hukum-pidana-soal-pengeroyokan-di-bali-00-r544s-605hy7>.

Kusuma, M. W. (2023, Desember). Polres Buleleng Tangani 494 Tindak Pidana Selama 2023, Meningkat 45%. Detik Bali. Diambil dari: <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7111874>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 127).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).

